

METODE PENELITIAN EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

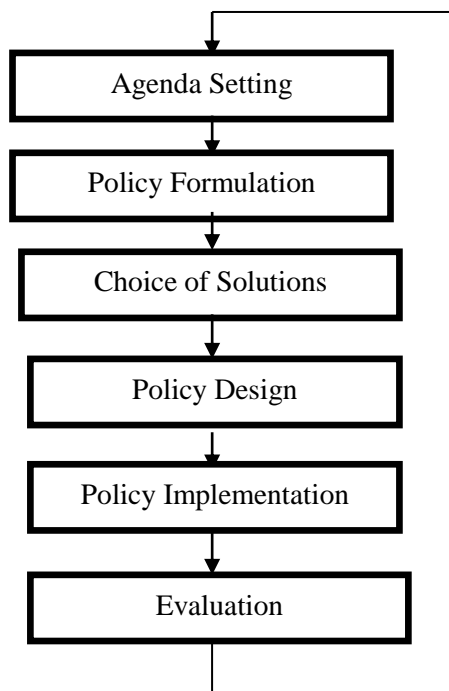
Oleh

Endang Mulyatiningsih

A. Pendahuluan

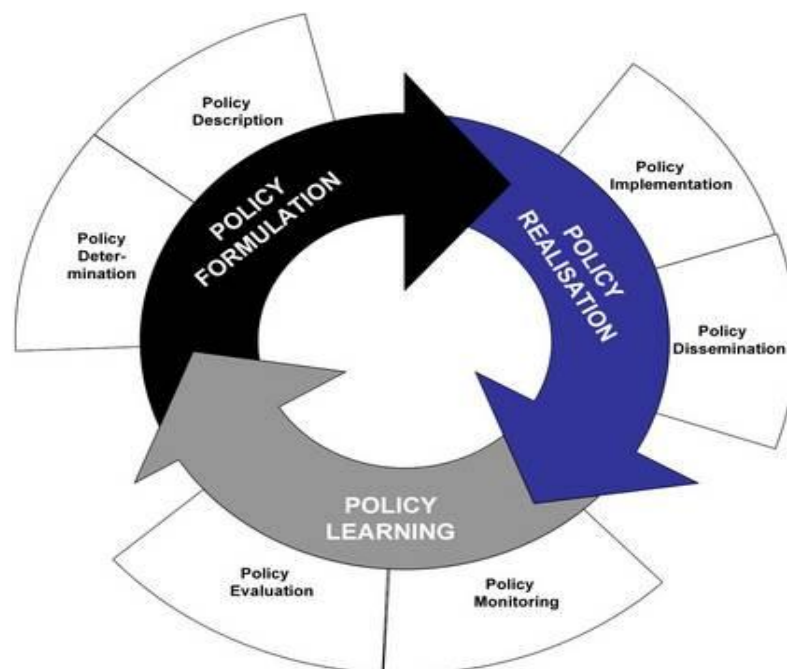
Metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengevaluasi masalah kebijakan cukup banyak dan setiap kegiatan evaluasi tidak harus menggunakan salah satu metode penelitian saja. Sebelum membahas tentang metode evaluasi kebijakan, peneliti perlu memahami dahulu tentang proses pengembangan kebijakan. Berikut ini disajikan dua contoh siklus pengembangan kebijakan yang pernah dilaksanakan oleh Anderson (1994) dan BMVIT (2005) pada gambar 1 dan gambar 2:

Siklus pengembangan kebijakan minimal terdiri dari tiga langkah utama yaitu: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Namun demikian, supaya kebijakan tidak memiliki banyak resiko, sebelum kebijakan dilaksanakan sering dilakukan studi untuk menilai kelayakan kebijakan atau menetapkan kebijakan yang tepat untuk dipilih. Setelah kebijakan dilaksanakan dilakukan evaluasi dan revisi sesuai dengan temuan hasil evaluasi. Dengan demikian, siklus pengembangan kebijakan yang lebih lengkap dapat memiliki lebih dari tiga tahap pengembangan. Pada contoh siklus pengembangan kebijakan yang tertera pada gambar 1 dan 2, masing-masing siklus terdiri dari 6 tahap kegiatan.



Gambar 7.1 Siklus Pengembangan Kebijakan Model Anderson

Kebijakan yang ideal ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan (*research and development*). Metode R & D memerlukan pengujian dan evaluasi pada semua tahap pengembangan. Metode penelitian yang digunakan dalam proses pengembangan kebijakan cukup bervariasi. Sebagai contoh: pada saat formulasi kebijakan diperlukan *focus group discussion* (FGD). Hasil FGD dilaporkan dengan cara deskriptif kualitatif. Setelah kebijakan diformulasi perlu dilakukan sosialisasi dan uji publik untuk mengetahui kebijakan tersebut layak atau tidak layak bila diimplementasikan. Pada tahap ini diperlukan metode penelitian survei. Setelah kebijakan diimplementasikan, hasil dan dampak kebijakan perlu dievaluasi untuk melihat dampak positif dan negatif yang diakibatkan dari kebijakan tersebut. Pada tahap ini diperlukan metode penelitian evaluasi program.



Gambar 7.2 Siklus Pengembangan Kebijakan Model BMVIT

Penelitian kebijakan bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi yang menjadi dasar bagi perumusan kebijakan, menunjang implementasi kebijakan, atau untuk mengetahui kinerja dan dampak dari kebijakan. Mengingat cakupan penelitian kebijakan ini sangat luas, maka untuk dapat menghasilkan rekomendasi yang berbasis pada data empiris diperlukan berbagai metode penelitian. Penelitian kebijakan dapat menggunakan metode penelitian survei apabila wilayah yang menjadi sasaran kebijakan cukup luas. Hasil penelitian survei dapat dilaporkan secara deskriptif eksploratoris atau eksplanatoris. Survei deskriptif eksploratoris dilakukan apabila peneliti tidak hanya melaporkan pendapat setuju atau tidak setuju tetapi juga mengeksplorasi alasan-alasan responden dalam menyatakan pendapatnya. Penelitian survei dilaporkan secara deskriptif eksplanatori apabila peneliti hanya melaporkan data apa adanya, peneliti hanya menjelaskan (mengeksplanasi) hasil-hasil temuannya.

Penelitian kebijakan juga sering dilakukan dengan cara menganalisis dokumen yang sudah ada. Dokumen dapat diperoleh dari lembaga yang diteliti atau laporan hasil penelitian. Apabila data bersumber dari dokumen, maka metode penelitian yang tepat digunakan adalah

analisis dokumen, sedangkan apabila data bersumber dari laporan hasil penelitian yang sudah ada, maka metode yang digunakan adalah meta analisis.

Kebijakan bersifat temporer, karena tidak ada satu kebijakan pun yang dipakai terus menerus. Penentu kebijakan membutuhkan umpan balik keputusan kebijakan yang telah ditetapkannya dalam jangka waktu yang sangat pendek. Apabila target waktu yang diberikan sangat pendek, peneliti dapat memilih strategi pengambilan data evaluasi kebijakan secara cepat dan akurat melalui poling. Poling dapat dilakukan melalui telepon, SMS, pengambilan suara terbanyak dengan PHP surveyor/ internet. Di antara beberapa cara tersebut, poling melalui survey di internet tidak disarankan karena satu orang responden dapat mengisi data lebih dari satu kali.

Selain metode penelitian survei, analisis dokumen dan poling, masih ada metode penelitian lain yang dapat digunakan dalam penelitian kebijakan yaitu meta analisis dan *research and development*. Meta analisis digunakan apabila data penelitian diperoleh dari hasil beberapa penelitian yang relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Metode tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian, keluasan cakupan wilayah penelitian, siklus pengembangan kebijakan dan target waktu yang ditetapkan. Seorang peneliti harus dapat memilih metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan kebijakan.

Gambaran umum tentang metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pada setiap tahap pengembangan diharapkan dapat membangkitkan inspirasi untuk meneliti. Seorang peneliti tidak perlu repot mencari tema-tema penelitian karena satu kebijakan membutuhkan banyak penelitian dan tema penelitian sudah tersedia pada kebijakan yang akan dan telah diimplementasikan. Tema penelitian kebijakan tidak terbatas pada kebijakan pendidikan tingkat nasional. Penelitian kebijakan dapat mengambil tema kebijakan yang dilaksanakan oleh wilayah provinsi, kabupaten maupun lembaga pendidikan. Dengan demikian, tema penelitian kebijakan terus menerus ada dan dapat direplikasi dengan cara mengambil judul penelitian yang sama tetapi sampel dan wilayah penelitian berbeda.

B. Metode-Metode Penelitian Kebijakan

Metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan cukup banyak. Setiap metode penelitian memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan tidak ada satu metode pun yang dapat digunakan untuk menjawab semua permasalahan yang diteliti. Namun demikian, ada beberapa komponen inti yang terdapat pada semua jenis penelitian yaitu: (1) siapa subjek/sumber data yang akan diteliti dan bagaimana cara menetapkannya?; (2) data penelitian apa yang akan dicari dan dengan alat apa data penelitian tersebut akan dikumpulkan?, (3) bagaimana cara mengolah data, menyimpulkan dan melaporkan hasil penelitian? Semua pertanyaan tersebut harus di jawab pada saat peneliti merancang metode penelitian. Cara menetapkan subjek, metode dan alat pengumpul data maupun cara analisis datanya disesuaikan dengan jenis penelitian dan data yang diinginkan. Berikut ini diberikan berapa contoh metode penelitian evaluasi kebijakan yaitu metode penelitian survei/telesurvei, analisis dokumen /meta analisis dan *responsive evaluation*.

1. Survei

Metode penelitian survei sering digunakan dalam penelitian deskriptif, eksplanatori dan eksploratori. Karakteristik khusus penelitian survei adalah kesimpulan hasil penelitian digeneralisasikan atau berlaku untuk seluruh populasi sasaran meski data penelitian hanya diperoleh dari sampel (sebagian populasi). Karena hasil penelitian akan berlaku untuk seluruh populasi maka sampel/subjek penelitian harus dipilih secara acak. Contoh penerapan konsep generalisasi misalnya: penelitian survei mengambil data pendapat 100 mahasiswa yang dipilih secara acak dari 1000 mahasiswa di salah satu perguruan tinggi. Penelitian

mengungkap persepsi mahasiswa terhadap kebijakan sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru. Hasil penelitian menemukan 90% mahasiswa menyatakan setuju, hal itu berarti bahwa Pendidikan Profesi Guru tersebut layak dilaksanakan meskipun tidak semua mahasiswa dimintai pendapatnya dalam proses pengumpulan data.

Penelitian survei menggunakan jumlah sampel yang besar. Menurut Borg & Gall (1989), jumlah sampel penelitian deskriptif minimal 100 orang. Alat pengumpul data untuk jumlah sampel besar biasanya menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan/ Pernyataan) karena dalam satu waktu dapat diambil data secara bersamaan. Pengisian kuesioner dapat dilakukan sendiri oleh subjek yang diteliti, dibacakan oleh pengambil data atau diisi orang lain yang paling tahu tentang subjek yang diteliti. Pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner sebaiknya memiliki jawaban yang sederhana sehingga responden tinggal memberi tanda cek pada kolom jawaban. Hal ini dapat membantu peneliti supaya mudah dalam proses pengolahan data selanjutnya.

2. Poling Telesurvei

Poling merupakan metode pengumpulan pendapat masyarakat dalam periode waktu yang pendek dan data hasil poling akan digeneralisasikan ke seluruh populasi sasaran. Poling termasuk jenis penelitian telesurvei atau survei jarak jauh. Disebut telesurvei karena cara pengambilan data poling bisa dilakukan lewat telepon, SMS atau server internet sehingga tidak ada tatap muka antara peneliti dengan subjek yang diteliti. Poling sebaiknya dilakukan melalui telepon. Cara poling yang hanya menerima informasi punya kecenderungan bias karena masyarakat sendiri yang memilih dirinya sebagai sampel dan ada kemungkinan satu orang responden akan mengisi lebih dari satu suara. Kejadian ini dikenal dengan nama SLOP (*Self-selected Listener Oriented Public Opinion Surveys*).

Metode poling lewat telepon memiliki keunggulan dan kelemahan. Menurut Eriyanto (1999) keunggulan poling lewat telepon antara lain: (1) dapat mengakses data dengan cepat; (2) pendapat responden tidak dipengaruhi oleh orang lain; (3) waktu wawancara lebih fleksibel dan ada pengendalian dari pewawancara. Keterbatasan poling lewat telepon adalah: (1) cakupan sampel sangat terbatas, yaitu hanya penduduk yang memiliki telepon; (2) responden yang diwawancarai dapat menolak atau menghentikan wawancara di tengah jalan; (3) wawancara lewat telepon hanya dapat mengakses sedikit informasi dan (4) pemanggilan lewat telepon sering tidak terhubung sehingga harus diulang atau mengganti dengan nomor telepon lain.

Penentuan subjek (sampel) poling lewat telepon dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu area sampling, sistematis sampling dan RDD (*random digit dialing*). Sampling area digunakan apabila peneliti ingin mendapat sampel yang acak dari tiap-tiap kode wilayah telepon misalnya wilayah Jakarta (kode 021), Jogjakarta (0274) dsb. Teknik *systematic random sampling* digunakan apabila sampel dipilih berdasarkan bilangan kelipatan pada daftar nama pelanggan telepon. RDD digunakan apabila nomor telepon yang akan dipanggil diacak pada kode wilayah tertentu. Prosedur pengambilan sampel melalui sistematis sampling dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menetapkan jumlah subjek/sampel untuk setiap kota
- b. Membagi jumlah halaman buku petunjuk telepon dengan jumlah sampel yang akan diambil untuk menghitung angka kelipatan nomor halaman (misalnya: jumlah halaman 110 dan jumlah sampel yang akan diambil 50, maka angka kelipatan nomor halaman yang diambil adalah $110:50 = 2,05$ atau dibulatkan 2). Jika nomor halaman awal ditetapkan secara acak pada halaman 3, maka halaman berikutnya yang dipilih adalah halaman 5, 7, 9, 11, dst.

- c. Masing-masing nomor halaman yang telah terpilih tersebut kemudian diambil sampelnya secara acak dengan menjatuhkan pensil atau benda lainnya. Nama atau nomor yang kejatuhan benda tersebut kemudian ditetapkan sebagai sampel terpilih.

Poling memiliki hasil yang lebih akurat apabila dilakukan dengan media telepon dan subjek penelitian diambil secara acak. Subjek poling sebaiknya dipilih kepala rumah tangga (bapak/ibu) atau orang dewasa yang dapat diwawancarai lewat telepon karena diasumsikan telah mempunyai pemikiran yang matang untuk berpendapat. Alat pengumpul data poling biasanya menggunakan kuesioner yang pengisiannya dibacakan lewat telepon dan wawancara.

Pertanyaan yang diajukan dapat mempengaruhi hasil poling. Satu permasalahan yang ditanyakan menggunakan pertanyaan berbeda akan memberi hasil yang berbeda. Oleh sebab itu, pertanyaan poling perlu divalidasi oleh ahli sebelum diimplementasikan untuk mengambil data. Validasi dilakukan pada isi, struktur kalimat dan format jawaban yang ditulis dalam instrumen tersebut melalui pertimbangan ahli (*expert judgment*). Validasi struktur kalimat pertanyaan meliputi: (1) pertanyaan tidak mengandung makna yang bias; (2) pertanyaan tidak mengandung makna yang ganda atau menimbulkan penafsiran yang berbeda; dan (3) pertanyaan mudah dipahami.

Pertanyaan poling mempunyai beberapa bentuk jawaban yaitu jawaban seri, kontingensi dan multidimensi. Pertanyaan yang mempunyai format jawaban seri digunakan untuk melihat penilaian responden atas aspek-aspek tertentu yang tidak mungkin terjawab hanya dengan satu pertanyaan. Pertanyaan yang mempunyai bentuk jawaban kontingensi digunakan untuk dua fungsi yaitu pertanyaan pertama berfungsi sebagai penyaring untuk mengetahui pendapat dari responden sedangkan pertanyaan kedua bertujuan untuk mengetahui alasan responden memilih alternatif jawaban yang diajukan. Pertanyaan yang mempunyai jawaban multi dimensi digunakan apabila dikehendaki dua jawaban bertingkat yaitu pertama untuk melacak pengetahuan responden terhadap kebijakan pemerintah dan dimensi berikutnya digunakan untuk menjaring pendapat responden apabila kebijakan pemerintah tersebut dilaksanakan. Semua jenis pertanyaan tersebut digunakan sesuai dengan karakteristik masalah yang akan diketahui jawabannya.

Tahap-tahap wawancara poling lewat telepon.

- a. Perkenalan diri dari pewawancara dengan menyebutkan lembaga penyelenggara poling, tema poling dan tujuan poling untuk meyakinkan responden bahwa pemanggilan lewat telepon tersebut resmi.
- b. Pewawancara menanyakan apakah nomor yang dihubungi sudah benar yaitu telepon rumah tangga dan bukan nomor kantor.
- c. Pewawancara kemudian meminta salah satu anggota keluarga yang berusia dewasa dan memenuhi karakteristik sampel yang diinginkan untuk menjawab pertanyaan lewat telepon.
- d. Pada saat wawancara, setiap pewawancara didampingi oleh satu orang pengawas dan satu orang petugas perekam data untuk menjamin data hasil wawancara akurat dan tidak lupa jawabannya.

3. Analisis Data Sekunder

Metode analisis data sekunder sering dinamakan *existing statistics*. Sumberdata sekunder dapat berasal dari database instansi, dokumen data statistik atau laporan hasil penelitian. Dalam penelitian analisis data sekunder, peneliti mengumpulkan sumber-sumber informasi melalui sumber data yang ditemukan tersebut. Peneliti menata kembali atau mengkombinasikan informasi ke dalam cara baru untuk menjawab pertanyaan penelitian. *Existing analysis research* lebih sering digunakan untuk penelitian deskriptif eksplanatori.

Contoh: peneliti menggunakan data sekunder untuk menganalisis kebutuhan lapangan kerja berdasarkan data statistik perkembangan jumlah industri dan jumlah peserta didik SMK. Hasil penelitian dapat digunakan untuk memproyeksikan program-program keahlian SMK yang sudah mulai jenuh atau sebaliknya. Kebutuhan tenaga kerja dapat diproyeksikan dari perkembangan jumlah industri penyerap tenaga kerja. Jumlah peserta didik pada program keahlian dapat ditambah apabila terjadi peningkatan kebutuhan tenaga kerja. Sebaliknya, apabila kebutuhan tenaga kerja sudah banyak yang terpenuhi, maka jumlah peserta didik perlu dibatasi.

4. *Meta analisis*

Penelitian meta analisis termasuk penelitian analisis data sekunder tetapi data sekunder yang dianalisis berupa data hasil penelitian yang mendukung. Penelitian meta-analisis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara merangkum, mereview dan menganalisis data penelitian dari beberapa hasil penelitian sebelumnya (Neill, 2006). Dengan menggunakan meta-analisis, beragam pertanyaan dapat ditelusur sepanjang pertanyaan tersebut logis dan tersedia data untuk menjawabnya. Penelitian meta analisis diawali dengan merumuskan masalah dan tujuan penelitian kemudian dilanjutkan dengan menelusuri hasil-hasil penelitian terbaru yang relevan. Dari data penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti sebelumnya, peneliti kemudian menganalisis data dan melaporkannya kembali dalam bentuk penelitian baru. Dengan demikian, laporan penelitian ini bukan duplikasi dari penelitian yang sudah pernah dilakukan karena peneliti hanya mengambil data penting untuk di analisis ulang dengan data dari penelitian lainnya. Sumber data penelitian meta analisis diperoleh dari hasil penelitian terbaru. Cara memperoleh sumber data dan di mana sumber data tersebut ditemukan perlu diceritakan. Nama peneliti sebelumnya juga disebutkan untuk memenuhi kode etik ilmiah. Dalam meta analisis, analisis data dilaporkan dengan cara merangkum dan mengambil intisari hasil penelitian saja. Selanjutnya, data dilaporkan kembali secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

5. *Responsive Evaluation*

Kebijakan yang berdampak luas perlu dievaluasi dengan beberapa pendekatan atau metode penelitian. Hasil survei saja mungkin tidak cukup untuk membuat rekomendasi yang tepat. Model evaluasi yang sering digunakan mengevaluasi kebijakan yaitu *responsive evaluation*. Model evaluasi ini lebih banyak menggunakan data kualitatif untuk mengambil keputusan kebijakan. *Responsive evaluation* pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stake, dalam artikelnya yang berjudul 'The Countenance of Educational Evaluation' pada tahun 1967. Menurut Madaus (1986: 303) *responsive evaluation* digunakan untuk evaluasi formatif ketika ada kasus yang mengindikasikan program tidak dapat mencapai hasil optimal. *Responsive evaluation* juga digunakan dalam evaluasi sumatif, ketika ada orang yang ingin memahami aktivitas pelaksanaan program.

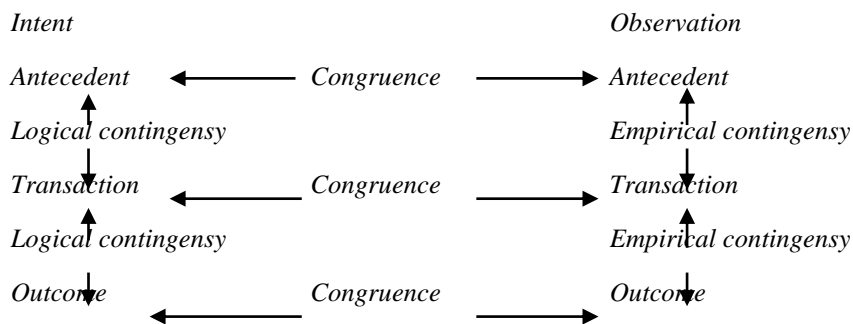
Worthen and Sanders (1973: 112-121), memberi penjelasan lebih lanjut tentang informasi yang diperlukan pada *responsive evaluation* yaitu *rational*, *antecedent*, *transaction* dan *outcome*. *Rational* menunjukkan latar belakang filosofi dan dasar tujuan sebuah program. *Antecedent*, transaksi dan *outcome* setara dengan input, proses dan produk. Data disusun dalam matriks deskripsi dan *judgment*. Untuk mengisi matriks tersebut, evaluator dapat mengumpulkan pertimbangan dari pengguna hasil evaluasi. Deskripsi data diklasifikasikan menjadi *intent* (tujuan yang diharapkan) dan keadaan yang observasi. Pernyataan *judgmental* diklasifikasikan pada keadaan yang memenuhi standar kualitas dan *judgment* khusus pada elemen program. Supaya lebih jelas, matriks data dapat diilustrasikan pada tabel 7.1.

Tabel 7.1 *Layout Data yang Dikumpulkan pada Responsive Evaluation*

	Intent	Observation		Standard	Judgment
RATIONAL	Antecedent yang diharapkan dan yang dilaksanakan		Antecedent	Standar anteseden	Pertimbangan anteseden
	Transaksi yang diharapkan dan yang dilaksanakan		Transaction	Standar transaksi	Pertimbangan transaksi
	Outcome yang diharapkan dan yang dilaksanakan		Outcome	Standar dampak	Pertimbangan dampak
	Description matrix			Judgment matrix	

Sumber: Stufflebeam (1985: 218)

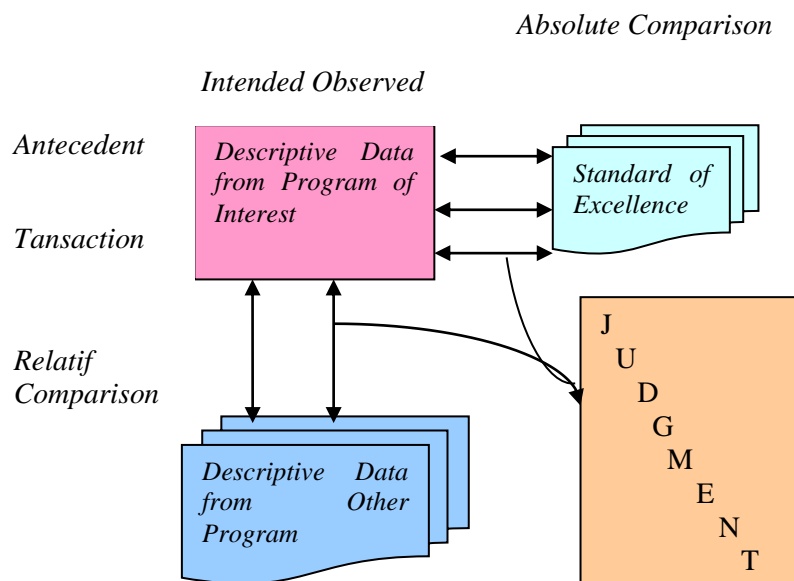
Ada dua cara prinsip yang dapat digunakan untuk memproses data evaluasi deskriptif pada program pendidikan yaitu menemukan *contingency* (kemungkinan yang dapat terjadi) antara anteseden, transaksi, dan *outcome* serta *congruence* (kesesuaian) antara tujuan yang diharapkan dan kondisi yang diobservasi. Data kurikulum dikatakan *congruence* apabila tujuan yang diharapkan secara nyata terpenuhi. Dalam satu garis matriks data, evaluator dapat membandingkan sel-sel yang berisi tujuan dan observasi, untuk mencatat kesenjangan dan menjelaskan sebuah kongruens dengan garis tersebut. Kongruens tidak mengindikasikan *outcome* harus reliabel atau valid tetapi apakah yang diharapkan dapat terjadi. Data deskriptif dapat diterangkan secara lebih jelas pada Gambar 7.4.



Gambar 7.3 Proses Deskripsi Data

Sumber: Stufflebeam, (1985: 221)

Hasil analisis kesenjangan antara tujuan yang diharapkan dan kenyataan yang diobservasi kemudian dibandingkan dengan standar kualitas. Standar adalah kriteria minimum yang harus dipenuhi pada sebuah program/kebijakan. Standar dapat ditetapkan pada saat merumuskan tujuan dan indikator keberhasilan. Ada dua tipe standar yaitu standar relatif dan standar absolut. Standar relatif merupakan standar alternatif sebuah program yang dianggap dapat memuaskan dan standar absolut adalah standar mutlak yang harus ada dalam sebuah program (Stufflebeam, 1985: 222). Standar merupakan *benchmarks* kinerja program atau kriteria yang menjadi pembanding untuk memutuskan program telah sukses atau gagal. Program dikatakan efektif, evaluasi dinyatakan lengkap apabila telah memenuhi standar yang ditetapkan. Proses pengambilan keputusan dalam responsive evaluation dapat diilustrasikan pada Gambar 7.5.



Gambar 7.4 Representasi Pengambilan Keputusan menurut Stake's
(Sumber: Stufflebeam, 1984: 224)

Sebelum membuat *judgment*, evaluator menentukan masing-masing standar terlebih dahulu. Masing-masing standar diberi bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya. Judgment diambil dengan cara membandingkan kesenjangan hasil observasi dengan tujuan yang diharapkan dan standar absolut yang telah ditetapkan oleh peneliti atau standar relatif pada program lain. Program dapat dinyatakan lebih baik dari program lain apabila hasil observasi lebih baik dari standar yang ditetapkan. Penggabungan *judgment* relatif dan absolut dapat dilakukan untuk membuat keputusan yang lebih rasional.

C. Komponen Masalah Kebijakan

Komponen yang dievaluasi dalam penelitian kebijakan bervariasi. Komponen yang dievaluasi dituliskan dalam rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Rumusan masalah yang dikembangkan untuk mengevaluasi kebijakan tergantung pada tujuan kebijakan tersebut di buat. Apabila tujuan kebijakan dirumuskan dengan jelas maka pertanyaan penelitian menjadi lebih mudah untuk dirumuskan. Menurut Purdon (2001) sedikitnya ada 6 temuan yang sering dicari dalam penelitian evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Temuan tentang pengguna layanan (sasaran) kebijakan.
2. Temuan tentang penyampai layanan (pelaksana) kebijakan.
3. Identifikasi beberapa variasi dalam penyampaian pelayanan.
4. Temuan tentang organisasi pelaksana kebijakan.
5. Melihat sumberdaya yang tersedia untuk melaksanakan kebijakan.
6. Melihat pengalaman sasaran pelaksanaan kebijakan.

Cara lain yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan adalah dengan melihat kebijakan sebagai sebuah sistem. Sistem memiliki komponen yang saling mendukung yaitu input, proses dan hasil dan dampak. Komponen sistem dapat menuntun peneliti dalam mengembangkan rumusan masalah penelitian. Secara berurutan, evaluasi kebijakan dapat dilakukan untuk melihat:

1. Pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, darimana mereka memperoleh informasi tentang kebijakan dan bagaimana pendapatnya terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan.
2. Komponen input kebijakan terdiri dari: sasaran, pelaksana, perangkat pendukung/sumberdaya, dsb. Pertanyaan yang dapat dieksplorasi dari input antara lain: kesesuaian kriteria input, ketersediaan input, kapasitas input, pengendalian input, dsb.
3. Komponen proses yang meliputi bagaimana pelaksanaan kebijakan, penyimpangan-penyimpangan apa yang terjadi selama pelaksanaan kebijakan, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan
4. Komponen hasil yang telah dicapai. Dalam melihat hasil, peneliti dapat mengajukan pertanyaan tentang: (a) apakah hasil sudah/belum sesuai dengan tujuan dikembangkannya kebijakan; (b) apakah efek yang ditimbulkan setelah implementasi kebijakan; (c) apakah implementasi kebijakan cukup efisien dan efektif; (d) bagaimanakah keberlanjutan implementasi kebijakan pada masa yang akan datang,
5. Komponen dampak perubahan yang terjadi setelah implementasi kebijakan. Dalam komponen ini dapat diajukan dampak positif dan negative yang telah ditimbulkan setelah kebijakan diimplementasikan

D. Format Penelitian Kebijakan

Penelitian disusun sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh pemberi dana atau jenis metode penelitian yang digunakan. Berikut ini disampaikan panduan penyusunan penelitian yang dipadukan dari Pedoman Penelitian yang dikeluarkan Lembaga Penelitian UNY (2010) dan Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional. Format penelitian ini lebih tepat untuk jenis penelitian survei dan data kuantitatif. Jika penelitian kebijakan akan didekati dengan penelitian kualitatif, maka populasi dan sampel diganti dengan sumber data penelitian.

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian/Hasil yang Diharapkan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

- A. Landasan Kebijakan
- B. Isu-isu Kebijakan
- A. Model-model Penerapan Kebijakan
- B. Hasil Penelitian yang Relevan

BAB III. METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan Penelitian
- B. Tempat dan Waktu Penelitian
- C. Populasi dan Sampel/Sumberdata Penelitian
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Instrumen Penelitian
- F. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Simpulan
- B. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

E. Contoh Kerangka Isi Penelitian Kebijakan

Garis besar isi penelitian kebijakan dan contoh aplikasinya dapat disimak pada paparan berikut ini.

1. Judul Penelitian

Judul penelitian dirumuskan dengan singkat dan jelas, mencerminkan permasalahan kebijakan yang akan diteliti dan rekomendasi yang akan dihasilkan. Contoh judul penelitian kebijakan.

- a. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Sistem PSB menggunakan RTO (*Real Time On-line*)
- b. Studi Kelayakan Implementasi Kebijakan Proporsi Peserta Didik SMK: SMA sebesar 67:33

2. Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

Bagian ini menguraikan latar belakang kasus aktual, konseptual ideologik, isu-isu kebijakan yang menunjukkan adanya permasalahan kebijakan. Kriteria permasalahan kebijakan yang paling menonjol adalah adanya keinginan masyarakat untuk mencari alternatif baru yang dapat meningkatkan atau memperbaiki kebijakan yang sedang diimplementasikan. Contoh kerangka latar belakang masalah kebijakan.

- 1) Kebijakan proporsi peserta didik SMK: SMA sebesar 67:33 telah ditetapkan dalam Renstra Depdiknas tahun 2005-2009
- 2) Proporsi peserta didik SMK: SMA sebesar 67:33 diharapkan telah dapat dicapai pada tahun 2009
- 3) Kebijakan perimbangan proporsi SMK:SMA sebesar 70:30 menuai polemik di masyarakat
- 4) Studi kelayakan implementasi kebijakan proporsi peserta didik SMK: SMA sebesar 67:33 penting dilakukan

b. Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian kebijakan dirumuskan untuk menghasilkan rekomendasi yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan demi tercapainya tujuan kebijakan.

- 1) Bagaimanakah persepsi masyarakat sasaran, SMK/SMA dan Dinas Pendidikan terhadap kebijakan proporsi peserta didik SMK: SMA sebesar 67:33?
- 2) Bagaimanakah animo masyarakat untuk mengakses pendidikan di

SMK?

- 3) Program studi keahlian apa saja yang memiliki daya serap lulusan SMK cukup tinggi?
- 4) Program studi keahlian apa saja yang memiliki animo dan daya serap lulusan tinggi sehingga berpotensi untuk dikembangkan,
- 5) Bagaimanakah kesiapan sekolah untuk memperluas program studi keahlian SMK

c. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian kebijakan menggambarkan berbagai alternatif rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan dan layak untuk memecahkan permasalahan kebijakan tertentu. Tujuan penelitian ditulis secara konsisten dengan rumusan masalah penelitian. Contoh tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis pada contoh sebelumnya.

- 1) Mengetahui persepsi masyarakat sasaran, SMK/SMA dan Dinas Pendidikan terhadap kebijakan proporsi peserta didik SMK: SMA sebesar 67:33.
- 2) Mengetahui animo masyarakat untuk mengakses pendidikan di SMK.
- 3) Mengetahui program studi keahlian yang memiliki daya serap lulusan SMK cukup tinggi.
- 4) Mengetahui program studi keahlian yang memiliki animo dan daya serap lulusan tinggi dan berpotensi untuk dikembangkan.
- 5) Mengetahui kesiapan sekolah untuk memperluas program studi keahlian SMK.

d. Manfaat Penelitian

Oleh karena penelitian kebijakan berorientasi pada pencairan alternatif rekomendasi kebijakan, maka perumusan manfaat penelitian harus dapat menunjukkan sasaran strategik yang akan memanfaatkan hasil penelitian tersebut. Sasaran strategik pengguna hasil evaluasi kebijakan terdiri dari: perancang, penentu (*decision making*), pelaksana dan sasaran kebijakan. Pada contoh penelitian kebijakan perimbangan proporsi peserta didik SMK: SMA sebesar 67:33 dapat diarahkan sasaran strategik yang akan memanfaatkan penelitian adalah:

- 1) Direktorat PSMK (Pembinaan SMK) dapat memanfaatkan hasil penelitian untuk memperbaiki dan menguatkan kebijakan penambahan jumlah siswa SMK.
- 2) Dinas Pendidikan propinsi dapat memanfaatkan hasil penelitian untuk memproyeksi kebutuhan program studi keahlian SMK yang layak untuk di buka.
- 3) SMK dan SMA dapat merancang perluasan program studi keahlian SMK.
- 4) Calon siswa SMK dapat memilih program studi keahlian yang memiliki prospek tinggi.

e. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ditulis mengacu kepada Rencana Strategis Pendidikan Nasional 2010-2014 yang sedang berlaku. Ruang lingkup Rencana Strategis Kemendiknas 2010-2014 meliputi:

- 1) Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
- 2) Akselerasi pembangunan pendidikan di daerah perbatasan, tertinggal dan bencana;
- 3) Koordinasi antar Kementerian/Lembaga serta pusat dan daerah;
- 4) Reformasi birokrasi;
- 5) Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal (PNFI);
- 6) Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
- 7) Rasionalisasi pendanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- 8) Penyediaan buku teks murah;
- 9) Penguatan dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- 10) Keterpaduan sistem evaluasi pendidikan;
- 11) Pengembangan metodologi pendidikan yang membangun manusia berjiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha;
- 12) Penerapan metodologi pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa;
- 13) Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawasan sekolah;
- 14) Peningkatan mutu LPTK dan lulusannya;
- 15) Sertifikasi dan kualifikasi guru.

Dengan melihat rencana strategis Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 – 2014 di atas, maka judul penelitian pada contoh ini termasuk dalam ruang lingkup kebijakan nomor ke satu yaitu:

Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri

3. Kajian Pustaka

Kajian pustaka diperlukan untuk: (a) mempertajam permasalahan kebijakan, (b) mendasari pengembangan strategi dan rancangan penelitiannya, (c) mendasari penyusunan instrumen dan penafsiran makna dari data yang akan diperoleh, dan (d) mendasari analisis dan perumusan alternatif kebijakan.

Oleh karena itu, kajian pustaka hendaknya dapat menunjukkan kebijakan dan peraturan yang menjadi konteks permasalahan penelitian, keluasan dan kedalaman konsep yang mendasari penelitian, serta informasi empirik untuk mendukung argumentasi yang dikembangkan dalam usulan penelitian tersebut. Contoh rangkaian kajian pustaka dapat berisi:

- 1) Landasan kebijakan Proporsi SMK:SMA sebesar 67:33
- 2) Informasi/Isu-isu (positif dan negatif) tentang pelaksanaan kebijakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri
- 3) Model-model pelaksanaan kebijakan penambahan peserta didik SMK: (membuka unit sekolah baru (USB), perluasan program studi keahlian di SMK; peralihan SMA menjadi SMK, dsb
- 4) Hasil-hasil penelitian kebijakan SMK yang relevan.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian kebijakan bertujuan menghasilkan saran alternatif rekomendasi kebijakan. Penetapan metode disesuaikan dengan hasil yang ingin dicapai. Komponen penting dalam usulan penelitian kebijakan sebagai berikut:

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian kebijakan pada umumnya menggunakan berbagai pendekatan penelitian seperti deskriptif eksploratoris, eksplanatoris, analisis dokumen dan evaluative. Pendekatan penelitian yang dipilih tergantung pada peran penelitian dalam proses pengembangan kebijakan, jumlah sampel yang akan diteliti dan jenis data yang dikumpulkan. Jika sampel penelitian banyak (>100) maka pendekatan penelitian survei tepat untuk digunakan. Jika penelitian hanya bekerja dengan data sekunder dan dokumen maka jenis penelitian analisis dokumen tepat untuk dipilih. Dalam contoh judul penelitian kebijakan proporsi siswa SMK: SMA sebesar 67:33 dapat dilakukan dengan pendekatan penelitian survei, deskriptif eksploratoris dan penelitian deskriptif evaluatif.

b. Populasi dan Sampling

Pada bagian ini perlu disebutkan secara eksplisit populasi sasaran penelitian dan teknik penentuan sampelnya. Hasil penelitian yang akan digeneralisasikan menuntut teknik pengambilan sampel secara acak, bisa menggunakan *stratified* atau *cluster* sampling. Apabila penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, maka subjek yang menjadi sumber data penelitian perlu disebutkan siapa saja. Pertimbangan yang diambil untuk menetapkan sumber data /subjek penelitian juga perlu dijelaskan alasannya.

c. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian kebijakan dapat berasal dari berbagai sumber data dan tidak tertutup kemungkinan suatu penelitian kebijakan menggunakan berbagai metode dan alat pengumpulan data. Dalam penelitian kebijakan harus jelas data yang diperlukan, sumber data, metode serta alat pengumpulan datanya. Keterkaitan antara jenis data satu dengan lainnya dapat ditata dalam suatu kerangka sistemik yang diturunkan berdasarkan kajian teoretik. Mengenai alat pengumpulan data dalam penelitian kebijakan, harus dapat menjamin bahwa informasi yang dihasilkan sah dan handal, sehingga dapat menjadi dasar untuk perumusan alternatif rekomendasi kebijakan. Triangulasi antar metode dilakukan untuk memenuhi kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika sumber data dan metode pengumpulan data yang digunakan bervariasi, peneliti dapat menuliskannya dalam bentuk matriks. Dalam matriks ditulis sumber data, jumlah sumber data, jenis data/informasi yang dikumpulkan dan metode pengumpulan data yang digunakan. Sumber data dan jenis data yang dikumpulkan pada penelitian kebijakan peningkatan proporsi siswa SMK:SMA menjadi 67:33 yang menjadi contoh dalam buku ini dapat disusun dalam matriks data sebagai berikut:

Sumber data	n	Jenis Data yang dicari	Metode
Staf Dinas Pendidikan Kepala Sekolah SMK		Persepsi terhadap Kebijakan SMK Kesiapan memperluas SMK	Wawancara
SMK		Data PPDB/PSB SMK	Dokumentasi
SMK/Dinas Pendidikan/ Disnaker		Data penyerapan lulusan SMK	Dokumentasi

e. Analisis Data

Penelitian kebijakan memuat rencana analisis data secara rinci, sesuai dengan tujuan dan fokus permasalahannya. Pada umumnya analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Analisis data deskriptif kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi, diagram dan persentase. Analisis data deskriptif kualitatif dilaporkan berdasarkan kelompok data dan sesuai dengan urutan rumusan masalahnya.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian disampaikan secara berurutan sesuai dengan urutan pemecahan masalahnya. Dalam contoh ini, hasil penelitian dapat dilaporkan dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Persepsi masyarakat terhadap kebijakan proporsi peserta didik SMK: SMA sebesar 67:33
- 2) Animo masyarakat untuk mengakses pendidikan di SMK
- 3) Daya serap lulusan SMK.
- 4) Prospek Perluasan Program Studi Keahlian SMK
- 5) Kesiapan sekolah melaksanakan Kebijakan proporsi peserta didik SMK: SMA sebesar 67:33

6. Kesimpulan dan Rekomendasi

Rekomendasi kebijakan dapat diputuskan dengan cara membandingkan fakta yang ditemukan dengan standar terbaik yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan.

Rekomendasi kebijakan dapat berisi alternatif untuk memperbaiki kebijakan, melanjutkan atau bahkan menghentikan kebijakan yang tidak layak diimplementasikan. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan harus disampaikan dengan kata-kata yang operasional dapat ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang mengambil keputusan kebijakan.

Contoh kesimpulan dan rekomendasi kebijakan:

KESIMPULAN:

- 1) Animo masyarakat terhadap SMK cukup baik dengan perimbangan proporsi SMK:SMA sebesar 66:44 dan perimbangan jumlah siswa SMK:SMA sebesar 57:43. Animo masyarakat terhadap kompetensi keahlian Mekanik Otomotif dan Akuntansi cukup tinggi dan program studi keahlian Seni Pertunjukan rendah.
- 2) Daya serap lulusan berubah-ubah setiap tahun, daya serap yang tinggi terletak pada kompetensi keahlian Tata Kecantikan.
- 3) Peningkatan jumlah peserta didik SMK menjadi 67% menghadapi kendala dari jumlah guru produktif dan industri pasangan masih kurang.

REKOMENDASI

1. Dinas Pendidikan
 - a. Menyusun pemetaan kompetensi keahlian SMK
 - b. Membatasi daya tampung kompetensi keahlian yang favorit supaya tidak terlalu jenuh
 - c. Menyusun proyeksi kebutuhan tenaga kerja

2. Kepada SMK
 - a. Selalu meningkatkan mutu SMK sehingga lulusannya dapat bersaing dengan lulusan sekolah lain dan dapat memperoleh input siswa yang berkualitas
 - b. Memberi keterampilan yang dapat membekali lulusan untuk berwirausaha
 - c. Mendirikan miniatur usaha untuk memberi keterampilan yang lebih kontekstual dengan dunia kerja
3. Kepada Siswa SMK
 - a. Selalu meningkatkan kompetensinya agar dapat bersaing dengan dengan lulusan dari sekolah lain
 - b. Tidak terlalu fanatik dengan kompetensi keahlian yang favorit
 - c. Membekali diri dengan keterampilan ganda

7. Daftar Pustaka

Daftar pustaka disusun sesuai dengan bahan acuan yang dipakai dalam penyusunan usulan penelitian, baik yang mengenai substansi isi maupun metodologi penelitiannya.

DAFTAR BACAAN

- Anderson J. E. (1994). *Public Policymaking. An Introduction*. Boston, Toronto: Houghton Mifflin Company
- Austrian Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT) *Model procedures for co-operation and coordination*. Diakses dari <http://www.transport-era.net/about-ent/description-of-ent/procedures-for-cooperation.html> pada hari Senin, 9 Agustus 2010
- Eriyanto. (1999). *Metodologi polling, memberdayakan suara rakyat*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Lembaga Penelitian UNY. (2004). *Pedoman Penelitian edisi tahun 2010*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta
- Madaus, G. F., & Stufflebeam, D. L. (Eds). (1985). *Systematic Evaluation, evaluation in education and human services*. Massachusetts: Chestnut Hill.
- Madaus, G. F., Scriven, M.S., & Stufflebeam, D.L. (1986). *Evaluation model, Viewpoint on educational and human service evaluation*. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing.
- Neill, J. (2006). *Meta-analysis research methodology*. <http://wilderdom.com>. Diakses tanggal 22 Juni 2010
- Neuman, W. L. (2003). *Social research methods, qualitative and quantitative approaches* (5th). Boston: Pearson Education Inc
- Worthen, B. R., & Sanders, J. R. (1973). *Educational evaluation: Theory and practice*. Worthington, Ohio: Charles A. Jones Publishing Company
- Purdon, S. (2001). *Research methods for policy evaluation*. London: Majesty's Stationery Office (HMSO). Diakses dari www.hmsogov.uk